



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BEKASI

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DRA LIA ERLIANI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DPRD**
3. NHK : **421131**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.948.000.000**

1. Tanah Seluas 1.200 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, Rp. 840.000.000
2. Tanah Seluas 4.000 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, Rp. 480.000.000
3. Tanah Seluas 420 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, Rp. 378.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/260 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , Rp. 1.250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.049.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKKAR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI VERSI 250CC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 42.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RAIZE 1.0 OTG SPORT CVT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 252.000.000
4. MOBIL, TOYOTA YARIS 1,5 S HV CVT TSS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 486.400.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 140.140.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**



Sub Total	Rp.	4.623.540.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.623.540.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BEKASI

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZALALUDIN
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 422160

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/100 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/120 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 322.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 11.500.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA2,4 G Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 70.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.700.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 42.968.857

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.375.668.857

III. HUTANG Rp. 1.198.022.915

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.177.645.942

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BEKASI

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ASTI RISWIWAYANTI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 421262

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.608.210
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.608.210

III. HUTANG Rp. 700.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -695.391.790

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BEKASI

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD SAHRONI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 422058

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.903.600.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/150 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 457.000.000
2. Tanah Seluas 970 m2 di KAB / KOTA BEKASI, Rp. 1.446.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 142.000.000

1. MOTOR, HONDA MATIK Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 8.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 2.053.600.000

III. HUTANG Rp. 10.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.043.600.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BEKASI

UNIT KERJA : RSUD DR. CHASBULLAH ABDULMADJID

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YULI SWASTIAWATI
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN
3. NHK : 685272

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.274.279.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 483 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , Rp. 3.285.429.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , Rp. 773.850.000
3. Tanah Seluas 195 m2 di KAB / KOTA BEKASI, Rp. 215.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 380.000.000

1. MOBIL, NISSAN SERENA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, YAMAHA X-MAX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 62.000.000
3. MOBIL, NISSAN XTRAIL Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 218.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 30.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.684.279.000

III. HUTANG Rp. 170.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.514.279.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.